

COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM MENCEGAH TIGA RESIKO ANCAMAN DASAR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (STUDI PADA YAYASAN PERGURUAN HARAPAN MANDIRI MEDAN)

Bismo Alifah Alfarizi, Muhammad Arifin Nasution

Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received Februari 2025

Revised Februari 2025

Accepted Februari 2025

Available online Februari 2025

Kata Kunci: *Collaborative Governance; TRIAD KRR; Program Generasi Berencana*

Keywords: *Collaborative Governance; RIAD KRR; Generasi Berencana Program*

ABSTRAK

Generasi Berencana (GenRe) adalah program yang dikelola oleh Dinas P3APMP2KB dengan fokus pada kesehatan reproduksi remaja di tingkat SMA dan setara di Kota Medan. Program ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Medan dan sekolah-sekolah setempat, bertujuan untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi terkait Tiga Resiko Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi dalam mencegah TRIAD KRR melalui program GenRe di Kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, serta dianalisis menggunakan indikator collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007): kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam proses collaborative governance yang dimulai pada kondisi awal, sosialisasi program pada pihak SMA, komitmen yang diberikan kedua pihak dengan adanya perencanaan pembuatan SK sebagai pendukung. Desain kelembagaan efektif dengan penyaluran SDM yang jelas dan forum dengan prosedur teratur. Kepemimpinan fasilitatif terlihat dari pembinaan dan pengawasan berkala. Proses kolaborasi berjalan baik melalui diskusi dan laporan kegiatan. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan dana dan masalah koordinasi antara dinas dan sekolah.

ABSTRACT

The Generasi Berencana (GenRe) program is managed by the Dinas P3APMP2KB with a focus on adolescent reproductive health at the high school level in Medan City. This program is a result of collaboration between the Medan City government and local schools, aiming to provide socialization, education, and facilitation related to the Three Basic Risks of Adolescent Reproductive Health (TRIAD KRR). The objective of this research is to evaluate the effectiveness of collaboration in preventing TRIAD KRR through the GenRe program in Medan City.

The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review, and analyzed using the collaborative governance indicators from Ansell and Gash (2007): initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes.

The research findings indicate that the collaborative governance process begins with initial conditions, including program socialization at the high school level and the commitment from both parties supported by the creation of an SK (decree). Institutional design is effective with clear human resource allocation and a forum with established procedures. Facilitative leadership is evident through regular guidance and supervision. The collaboration process is effective, supported by discussions and activity reports. However, the main challenges are funding limitations and coordination issues between the agency and schools.

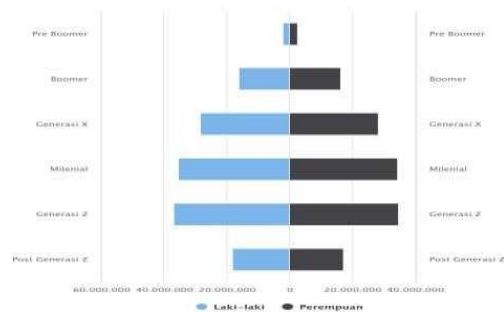
PENDAHULUAN

Collaborative governance merupakan proses mengambil keputusan secara bersama-sama yang terdiri dari satu atau lebih lembaga pemerintah yang berkaitan dengan lembaga non pemerintah dengan tujuan melaksanakan implementasi kebijakan publik dan mengelola aset publik (Ansell & Gash, 2007). Kerjasama antar pihak dalam pemerintahan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah publik. Collaborative governance melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Di Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia, pertumbuhan penduduk saat ini adalah 1,49 persen per tahun. Pemerintah menargetkan penurunan laju pertumbuhan menjadi satu hingga dua juta orang per tahun pada 2025.

Jumlah remaja di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi potensi positif, tetapi tanpa pembinaan yang memadai, dapat menimbulkan masalah. Perilaku remaja mempengaruhi perkembangan nasional dan kualitas generasi mendatang. Remaja, sebagai agen perubahan, memiliki peran penting untuk masa depan bangsa. Menurut WHO, remaja berusia 10-19 tahun, sementara BKKBN mendefinisikan remaja sebagai 10-24 tahun untuk yang belum menikah, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 25/2014 menetapkan 10-18 tahun. Aktivitas remaja mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Karena remaja merupakan bagian produktif masyarakat, mereka harus memiliki keterampilan, kelakuan baik, dan rasa tanggung jawab tinggi untuk kelangsungan kehidupan masyarakat.

Program Genre merupakan program yang ditujukan khususnya kepada para remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah, keluarga serta masyarakat peduli remaja yang diharapkan nantinya mampu mempromosikan penundaan usia kawin, penyediaan informasi kesehatan reproduksi seluas-luasnya kepada para remaja sehingga nantinya mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan dan karir secara terencana, serta menikah dengan perencanaan yang matang sesuai siklus kesehatan reproduksi. Lebih jauh, program ini diharapkan mampu mengatasi persoalan kuantitas (laju pertumbuhan) dan kualitas penduduk yang tidak terjebak pada Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) atau tiga resiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu Seksualitas, HIV/ AIDS dan Napza.

Gambar 1. Jumlah Penduduk



Pada gambar di atas, dengan meningkatnya kelahiran Gen-Z maka berpotensi juga risiko TRIAD KRR yang terjadi pada remaja sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang optimal dapat terjadi ketika jumlah angkatan kerja produktif lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Idealnya, pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya saat Rasio Ketergantungan berada di bawah angka 50, yang dikenal sebagai "*the window of opportunity*" atau jendela kesempatan (Isnaini dkk, 2020; Marbun dkk, 2020).

Saat ini, pemerintah telah menetapkan kerangka hukum dan pedoman untuk membina remaja, termasuk Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 47/HK.010/B5/2010 tentang Program Generasi Berencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas remaja melalui informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan terkait kehidupan berkeluarga, serta mengatasi risiko seperti seksualitas, pernikahan dini, dan penyalahgunaan zat adiktif. Pembinaan remaja sangat penting untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi berkualitas. Dengan proyeksi jumlah remaja yang terus meningkat, Program GenRe bertujuan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. BKKBN bertanggung jawab atas

pembinaan ini, dengan regulasi yang mendukung pengembangan keluarga dan sistem informasi keluarga.

Remaja saat ini menghadapi perilaku berisiko seperti menikah pada usia dini, terlibat dalam hubungan seks sebelum menikah, dan penggunaan NAPZA, dan Program GenRe diarahkan untuk mengatasi dan mengedukasi mereka terhadap dampak negatif dari perilaku tersebut. Collaborative Governance melalui Program Generasi Berencana (GENRE) untuk mencegah Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di Kota Medan mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dalam menjaga kesehatan reproduksi dan kesejahteraan remaja di Kota Medan. Kesehatan reproduksi remaja merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan mereka, namun seringkali remaja menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka.

Adapun permasalahan di Kota Medan terkait program GENRE pada Triad KRR Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yaitu masi banyak remaja di Kota Medan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan terjangkau, baik karena faktor geografis maupun sosioekonomi. Kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif, kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah maupun di lingkungan keluarga dapat menyebabkan remaja kurang memahami pentingnya kesehatan reproduksi dan cara-cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Tingginya angka kehamilan remaja, tingginya angka kehamilan pada usia remaja di Kota Medan mengindikasikan adanya masalah dalam praktik-praktik seksual yang sehat dan aman di kalangan remaja. Stigma dan diskriminasi, stigma dan diskriminasi terhadap remaja yang mencari informasi atau

layanan kesehatan reproduksi juga merupakan kendala yang serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Triad KRR.

Penelitian mengenai *collaborative governance* memang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Winda Anggraeni (2022) tentang “*Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Penanganan Stunting*” menemukan bahwa kegiatan seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan pemantauan gizi diharapkan meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, terutama PKK, dalam pencegahan stunting. Program penanggulangan stunting di Kelurahan Tanjungmas melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta, masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam sebuah kolaborasi terkoordinasi. PKK berperan sebagai fasilitator dan pendamping, bekerja sama dengan PT Pertamina, puskesmas, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait untuk intervensi yang terorganisir dan terpadu.

Selanjutnya penelitian oleh Yuni Kurniasih dkk. (2023) menemukan bahwa *collaborative governance* efektif dalam pencegahan stunting di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan SK Bupati Temanggung dan teori Ansell, Gash, serta Emerson dkk., pembentukan lembaga koordinasi dan kelompok kerja dengan Bappeda sebagai pimpinan berhasil menurunkan angka stunting dari 20,5% menjadi 17,6% melalui delapan aksi konvergensi dan meningkatkan komitmen bersama. Terakhir penelitian oleh Elok Prihatin dkk. menemukan bahwa kolaborasi dalam menangani kenakalan remaja di Kabupaten Tegal berjalan baik, dengan fokus pada dialog, kepercayaan, dan pemahaman bersama. Namun, partisipasi masyarakat dan swasta kurang aktif. Faktor pendukung termasuk kualitas SDM dan transparansi, sedangkan penghambat meliputi

keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi. Maka dilihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena fokusnya pada pencegahan Triad KRR melalui Program Generasi Berencana, yang belum banyak diteliti. Pendekatan collaborative governance melalui Program GenRe penting untuk pencegahan Triad KRR di Kota Medan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana *Collaborative Governance* Melalui Program Generasi Berencana Dalam Mencegah Tiga Resiko Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada Yayasan Perguruan Harapan Mandiri Medan).

TINJAUAN PUSTAKA

Governance

Governance atau tata kelola didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu civil society. *Governance* merupakan sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan semua aktor dan stakeholder (Asaduzzaman, 2020).

Menurut Kaufmann et al., (2000), *governance* berkaitan dengan tiga perspektif, yaitu:

1. Proses dengan mana suatu pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan diganti

2. Kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan
3. Ruang publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Governance tidak sama dengan *government* (pemerintah) dalam arti sebagai lembaga, tetapi *governance* adalah proses pemerintahan dalam arti yang luas (Dwipayana, 2003). Di Indonesia kata *government* lazim diartikan sebagai pemerintah” dan kata *governance* sering diterjemahkan sebagai “kepemerintahan” atau “tata pemerintahan”. Pengertian *government* dipahami sebagai proses formal dan institusional yang berjalan pada tingkatan nation state (negara-bangsa) untuk mempertahankan keteraturan publik dan memfasilitasi tindakan kolektif sedangkan proses *governance* mengacu pada outcomes (hasil) yang paralel dengan outcome (hasil) dari institusi pemerintah sebagaimana yang sudah kita kenal pada umumnya. Artinya bahwa output yang ingin dicapai oleh *governance* atau *government* adalah sama yang membedakan keduanya adalah terutama adalah dalam hal proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan atau disepakati.

Menurut Chema dalam (Keban, 2008), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Selain itu menurut (Kurniawan, 2007) *governance* adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan negara (pemerintah), sektor privat maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Dari beberapa pengertian

diatas dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah.

Collaborative Governance

Collaborative governance muncul dan dikembangkan secara adaptif untuk merespon adanya kompleksitas dan konflik-konflik bernuansa politik atau persoalan-persoalan yang menuntut diadopsinya nilai-nilai demokrasi, namun konsep tersebut tidak atau belum diinspirasi oleh filosofi politis atau teori tertentu. Dengan kata lain ada kecenderungan bahwa dilakukannya *collaborative governance* didorong oleh adanya upaya pragmatisme dalam menyelesaikan masalah yang selama ini tidak kunjung teratasi melalui penerapan teori-teori konvensional yang selama ini dipercaya mampu mengatasi masalah tersebut.

Dalam realitasnya ada kecenderungan bahwa kolaborasi dilakukan karena ada persoalan yang memang tidak bisa dihadapi atau ditangani hanya oleh satu institusi saja dan melakukan kolaborasi diharapkan ini diharapkan persoalan yang dihadapi bisa diatasi. Namun kolaborasi hanya bisa dijalankan lebih efektif jika paling tidak diantara mereka yang terlibat sama-sama memiliki kepentingan dan kebutuhan bersama terkait dengan persoalan yang dihadapi. Sementara itu, diketahui banyak pendapat tentang *collaborative governance* dan masing-masing pendapat cenderung berbeda-beda dalam hal cakupannya.

Ansell dan Gash (2007:533) mempunyai pandangan tentang *collaborative governance* sebagai berikut :

Over the last two decades, a new strategy of governing called 'collaborative governance' has developed. This mode of governance brings multiple stakeholders together in common forums with public agencies to engage in

consensus-oriented decision making. (lebih dari dua dekade terakhir, sebuah strategi baru yang disebut *collaborative governance* sudah diterapkan. Model pemerintahan membawa banyak pemangku kepentingan bersama dalam forum umum dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus.

Collaborative Governance merupakan sebuah pengaturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama dan sifatnya musyawarah. Kolaborasi pemerintah ini juga bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik serta mengelola sebuah program pemerintah. Jika dilihat sisi proses, dalam kolaborasi terdapat elemen identifikasi atas perbedaan-perbedaan diantara para aktor yang otonom untuk kemudian mereduksinya melalui negoisasi. Selain itu, dalam kolaborasi terdapat upaya untuk menyusun struktur dan aturan main di antara para aktor (Thomson dalam Wood and Gray, 1991).

Ansell dan Gash (Sudarmo, 2015:197) menjelaskan pengertian kolaborasi dalam dua pengertian yaitu :

1. Kolaborasi dalam arti proses, merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi termasuk institusi pemerintah maupun non pemerintah/non profit ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya.
2. Kolaborasi dalam arti normatif, merupakan proses aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para mitranya.

Model Collaborative Governance

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2007) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Dalam teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, "kondisi awal" merupakan tahap awal yang mencakup sejumlah faktor kompleks dalam dinamika kolaboratif. Istilah ini tidak hanya mengacu pada situasi permulaan secara fisik atau temporal, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan organisasional yang mempengaruhi interaksi antarpihak yang terlibat dalam kolaborasi.

Selain itu, "kondisi awal" juga menyoroti pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan tujuan di antara para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Pihak-pihak yang berbeda mungkin memiliki prioritas yang berbeda terkait dengan masalah yang dihadapi, serta visi yang berbeda terkait dengan solusi yang diinginkan. Selanjutnya, "kondisi awal" mencakup evaluasi terhadap kapasitas kolaboratif masing-masing pihak. Hal ini mencakup kesiapan mereka untuk berpartisipasi secara aktif, berkontribusi dengan sumber daya yang mereka miliki, serta komitmen mereka terhadap proses kolaboratif yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

2. Desain institusional (*Institutional Design*)

Ansell dan Gash mendeskripsikan bahwa Desain Intitusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah

pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif. Desain institusi dalam collaborative governance memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama yang efektif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan konsep yang menekankan pentingnya peran pemimpin dalam memfasilitasi proses kolaboratif di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu inisiatif atau proyek. Kepemimpinan ini tidak hanya terbatas pada aspek formal seperti kekuasaan atau hierarki, tetapi lebih kepada gaya kepemimpinan yang mempromosikan partisipasi aktif, dialog terbuka, dan konsensus dalam pengambilan keputusan.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan implementasi.

Proses kolaboratif ini bukan sekadar tentang kehadiran fisik dalam pertemuan, tetapi juga tentang keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program. Komunikasi yang jujur dan terbuka sangat penting, memastikan semua pihak memiliki informasi yang dibutuhkan dan dapat berdiskusi dengan produktif.

Hambatan *Collaborative Governance*

Kolaborasi yang efektif dapat tercipta apabila mensyaratkan para pelayan publik untuk memiliki keterampilan dan kesediaan untuk masuk ke kemitraan secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. Hal tersebut

dapat mengabaikan konvensi dan menjadikan segala sesuatu dilakukan dalam sebuah kolaborasi. Tetapi, kolaborasi dalam pelayanan publik yang tergantung pada prosedur dan tidak bersedia mengambil risiko tidak mungkin akan menjadikan kolaborasi sebuah kenyataan.

Kegagalan kolaborasi masih disebabkan dipertahankannya pendekatan “*top-down*” oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain. Kolaborasi juga bisa gagal karena kooptasi dan strategi pecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah (Sudarmo, 2010). Institusi-institusi yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal, sehingga akuntabilitas institusi dan arah kebijakannya juga bersifat vertikal.

Hambatan lainnya bagi kolaborasi adalah terjadinya dan kakunya “batasan definisi” dan “kondisi” yang ditentukan pihak pemerintah. Sering terjadi dalam institusi pemerintah, rencana-rencana dan inisiatif-inisiatif terikat oleh harapan, prosedur, ketersediaan dan sumber daya yang melimpah dan duplikatif. sehingga sulit dibayangkan menyelenggarakan bentuk kolaborasi dengan para aktor di luar organisasi untuk memperoleh pemahaman yang sama (Sudarmo, 2010).

Kerjasama dalam *collaborative governance* bisa mengalami kegagalan karena terjadi perubahan kesepakatan yang telah dibuat di awal dan munculnya kepentingan yang berbeda di antara para pemangku kepentingan, termasuk pemimpin dari masing-masing kelompok yang terlibat. Sebagaimana yang disoroti oleh Sudarmo (2010), kegagalan semacam ini seringkali disebabkan oleh perubahan dalam ketentuan awal

yang disepakati serta munculnya agenda baru yang beragam di kalangan pemangku kepentingan.

2.3 Program Generasi Berencana (GENRE)

Suharsimi Arikunto (2012) menjelaskan bahwa program adalah suatu aktivitas yang dipersiapkan dengan teliti dan perencanaan yang matang. Sedangkan menurut Farida Yusuf Tayibnapi (2013) menjelaskan bahwa program dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan seseorang dengan harapan akan menghasilkan dampak atau pengaruh tertentu. Selain itu, menurut Agustini (2017), program dapat dijelaskan sebagai kumpulan kata atau pernyataan yang digabungkan dan disusun sedemikian rupa menjadi satu rangkaian langkah prosedur untuk mencapai suatu tujuan.

Program Generasi Berencana adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), yakni tiga risiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu seksualitas, HIV/AIDS, dan Napza, penundaan usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

2.4 Triad KRR

Triad KRR adalah tiga resiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu Seksualitas, HIV/ AIDS dan Napza. KRR merupakan kepanjangan dari Kesehatan Reproduksi Remaja. Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk seksual, yaitu emosi,

perasaan, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual dan orientasi seksual.

TRIAD KRR adalah tiga resiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu Seksualitas, HIV/ AIDS dan Napza. KRR merupakan kepanjangan dari kesehatan reproduksi remaja. Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk seksual, yaitu emosi, perasaan, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual dan orientasi seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Yayasan Perguruan Harapan Mandiri, Kota Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta data sekunder diperoleh dari skripsi, jurnal, artikel dan dokumen pendukung lainnya dari Yayasan Perguruan Harapan Mandiri. Penentuan informan penelitian ini diperlukan teknik purposive sampling dimana menentukan informan berdasarkan karakteristik dan kriteria yang dianggap mampu menjawab permasalahan yang ada, dan menggunakan teknik snowball sampling yaitu pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak dan berhenti ketika info yang didapatkan telah "jenuh". Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian Collaborative Governance Melalui Program Generasi Berencana dengan pihak swasta dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan salah satu model Collaborative Governance yang

dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007). Dimana pada model ini beliau menggunakan empat indikator, antara lain: kondisi awal (starting conditions), desain kelembagaan (institutional design), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), dan proses kolaboratif (collaborative process).

Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Kondisi awal merupakan indikator pertama dalam model collaborative governance Ansell & Gash (2007). Dimana pada kondisi awal ini akan melihat ketimpangan pada pengaruh kekuatan, sumberdaya serta pengetahuan dari pemangku kepentingan. Isu isu permasalahan awal itu menjadi dasar pemerintah khususnya pihak Dinas P3APMP2KB Kota Medan melakukan kolaborasi, meningkatnya seks bebas, pernikahan dini di usia yang sangat serta penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi dasar penggerakan pemerintah dalam mencegah hal itu atau disebut Triad KRR.

Kondisi awal permasalahan yang terjadi di Sekolah Harapan Mandiri menghadapi masalah serius berupa kasus hamil di luar nikah dan pergaulan bebas, seperti merokok di lingkungan sekolah. Untuk mencegah hal ini, pihak sekolah mencari solusi jangka panjang dan mendapatkan informasi tentang Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dari seorang orang tua siswa. Ibu Lista, Koordinator Program GenRe PIK-R,

mulai memahami program ini setelah diberi informasi oleh orang tua siswa. Namun, ada juga pernyataan dari seorang siswi yang menunjukkan pandangan negatif terhadap upaya tersebut. Pada tahap awal pemerintah khususnya pihak Dinas dengan pihak swasta atau sekolah itu sangat baik dalam hal komunikasi, dan juga pada saat masuknya program tersebut, pemerintah secara jelas melakukan pembinaan.

Sesuai dengan yang dikemukakan Ansell & Gash dalam indikator kondisi awal yaitu peluang dilakukannya program PIK R itu sendiri sesuai dengan yang di utarakan oleh ketua PIK R di Sekolah Harapan Mandiri, yakni:

“Untuk program awal tidak ada keraguan sama sekali dalam kami untuk melakukannya namun di sekolah ini juga PIK R tersebut menjadi ekstrakurikuler kami di mana siswa siswi yang mempunyai minat dalam hal tersebut dipersilahkan ikut secara terbuka.” (Wawancara Damar Alfaridho, 12 Juni 2024).

Berdasarkan pernyataan oleh Ketua PIK R di Sekolah Harapan Mandiri tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi awal terbentuknya PIK R di Sekolah di respon dengan baik oleh para siswa/I. tetapi tentunya proses ini harus membutuhkan waktu dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala dikarenakan belum adanya Kerjasama sebelum ini untuk mencegah Triad KRR ini sesuai dengan pernyataan Ibu Martinijal Ketua Tim Bina Ketahanan Remaja DP3APMP2KB Kota Medan, yakni:

“Untuk pertama tam aitu pasti memakan waktu lumayan yah untuk melakukan pembinaan dan pelatihan, apalagi belum ada tuh program atau Kerjasama sebelumnya, jadi pihak swasta ataupun sekolah sekolah itu belum ada gambaran sama sekali tentang program PIK R ataupun cara untuk mencegah Triad KRR ini.” (Wawancara Ibu Martinijal, 4 Juni 2024).

Pengawasan dilakukan terus menerus secara berkala oleh pihak Dinas, dengan sosialisasi yang dilakukan setiap bulan dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan program, pihak Dinas juga melakukan observasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pihak sekolah sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Martinijal Ketua Tim Bina Ketahanan Remaja DP3APMP2KB Kota Medan sebagai berikut:

“Untuk tahapan awal itu kami juga liat di sekolah fasilitas apa yang kurang bagi mereka untuk melaksanakan program ini, jadi yaa Namanya mau melaksanakan program kan butuh fasilitas.” (Wawancara Ibu Martinijal, 4 Juni 2024).

Hubungan dengan pihak Sekolah Harapan Mandiri degan pihak Dinad P2APMP2KB Kota Medan ini berjalan dengan baik seiring berjalannya program Generasi Berencana PIK R tersebut, namun dibalik dengan hubungan yang baik masih ada terdapat ketimpangan sumber daya. Kolaborasi tidak akan pernah berjalan apabila



kedua pihak belum memiliki kesetaraan SDM, fasilitas maupun keuangan. Menurut Ansell and Gash (2007), para pemangku kepentingan baik yang lemah maupun yang kuat harus yakin bahwa mereka akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan dari adanya kolaborasi ini. Kondisi awal memiliki sub indikator yang dapat mendukung ataupun menghambat terjadinya proses kolaborasi.

Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Desain kelembagaan menurut Ansell dan Gash (2007) penting dalam collaborative governance, mencakup struktur kekuasaan, distribusi sumber daya, dan konteks sosial. Dinas P3APMP2KB kota Medan berkolaborasi untuk mencegah TRIAD KRR (seksualitas, pernikahan dini, NAPZA) melalui PIK-R, berdasarkan regulasi seperti UU No. 52 Tahun 2009 dan Perpres No. 62 Tahun 2010. Program ini dijalankan bersama sekolah Perguruan Harapan Mandiri, dengan sekolah mengelola sumber daya dan Dinas memberikan dukungan. Pasal spesifik tentang alokasi sumber daya tidak ada, namun ada aturan dasar terkait pencegahan TRIAD KRR.

Selanjutnya, pada desain kelembagaan terdapat sub indikator yaitu partisipasi dan juga forum bersama, berikut yang dijelaskan oleh Ibu Martinijal selaku Ketua Bina Ketahanan Remaja, yakni :

“Kalau untuk rapat atau pertemuan itu ada kita lakukan setiap bulannya secara merata di semua kecamatan itu biasanya itu dari PLKB yang memonitor dan yang mengatur

pertemuan itu tapi kadang kami juga dari pihak inti yang meminta pertemuan.”
(Wawancara Ibu Martinijal, 4 Juni 2024).

Jadi pihak Dinas itu di bantu juga dengan PLKB dalam melakukan pemantauan terhadap program ini. Tetapi pihak sekolah juga terkadang melakukan lapor langsung, serta meminta untuk melakukan pembinaan dan juga diskusi terhadap kegiatan yang hendak dilakukan. Maka dalam desain kelembagaan, kultur organisasi mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antara Dinas dan Sekolah. Sikap, perbedaan pendapat, dan etika kerja berperan penting. Kolaborasi memerlukan tujuan bersama dan keputusan terbaik, meskipun terdapat potensi konflik.

Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Indikator ketiga dalam collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) adalah kepemimpinan fasilitatif. Pemimpin kolaboratif bertindak sebagai fasilitator, menciptakan sinergi dan solusi inovatif melalui keterampilan seperti mempromosikan partisipasi, memastikan kontrol yang luas, memfasilitasi dinamika kelompok, dan memperluas cakupan proses. Dinas P3APMP2KB, kepemimpinan fasilitatif diwujudkan melalui forum GenRe. Namun, terdapat kekurangan dalam pemantauan dan evaluasi program serta kurangnya media khusus untuk sosialisasi program. Tantangan meliputi masalah sumber daya dan kebutuhan evaluasi berkala. Sosialisasi awal dilakukan untuk mengedukasi pihak terkait, tetapi promosi program masih terbatas.



Gambar 2. Laporan Kegiatan Forum GenRe

Sumber: Instagram Forum GenRe Kota Medan

Pemimpin fasilitatif di Dinas P3APMP2KB Medan kurang aktif di media sosial, seperti Instagram @forumgenrekotamedan yang terakhir mengunggah laporan kegiatan pada bulan Maret. Untuk menurunkan kasus TRIAD KRR, pemimpin perlu lebih aktif memonitor dan berkomunikasi dengan pihak terkait. Dinas P3APMP2KB harus memastikan komunikasi yang efektif agar program ini berkelanjutan dan berdampak pada remaja.

Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Proses kolaboratif adalah indikator utama dalam model collaborative governance menurut Ansell & Gash (2007). Proses ini dimulai dengan dialog tatap muka antara pemangku kepentingan, yang meningkatkan kepercayaan dan komitmen bersama, serta membantu menyusun solusi. Dinas P3APMP2KB Kota Medan dan Sekolah Harapan Mandiri rutin mengadakan pertemuan langsung untuk sosialisasi

dan evaluasi program GenRe, yang memperkuat kerjasama. Namun, komunikasi melalui media sosial kurang aktif, dengan laporan terakhir pada Maret.

Pembangunan kepercayaan (trust building) antara Dinas dan Sekolah sangat penting. Dinas perlu menunjukkan komitmen dan dukungan, sementara sekolah harus transparan dan aktif. Kepercayaan ini menjadi dasar kolaborasi untuk mencegah TRIAD KRR, dengan kedua pihak saling percaya pada efektivitas program. Rasa kepercayaan semakin erat dengan dikeluarkannya surat SK yang menandakan bahwa terdapat kesepakatan atau kolaborasi antara pihak Dinas dengan pihak Swasta. Ditambah kepercayaan tersebut didukung dengan intensitas yang dilakukan Sekolah Harapan mandiri terhadap PIK R tersebut dimana kegiatan tersebut dijadikan ekstrakurikuler seperti kegiatan kegiatan di dalam kota dan juga komunikasi yang terdapat setiap bulannya tentang pembinaan yang sudah dipaparkan di indikator sebelumnya.

Fasilitas yang telah diberikan oleh pihak pemerintah masih ada sedikit kekurangan yang didapati oleh sekolah ataupun kendala yang dialami sekolah dalam melaksanakan program generasi berencana ini salah satunya adalah perihal dana, yang sekolah harapkan kedepannya adalah alokasi dana yang telah ditetapkan dan disepakati untuk melaksanakan Program Generasi berencana. Kondisi atau pergaulan yang terjadi di sekolah itu juga merupakan upaya yang tidak gampang bagi mereka



untuk mengetahuinya hal itu dilakukan dengan cara melibatkan seluruh siswa/I, seperti pernyataan oleh Ibu Lista, yakni:

“Kalau tentang adanya permasalahan di pergaulan mereka ataupun ada kasus kasus terus misalnya juga di kelas itu ada yang bukannya tidak mengenakan pasti kami langsung mencari tau lebih dalam dengan cara itu orang ke orang jadi informasinya itu kami dapati dari kuping ke kuping lah istilahnya.” (Wawancara Ibu Lista, 12 Juni 2024).

Hasil sementara dari adanya program ini, dapat dilihat bahwa tingginya tingkat kepedulian antar siswa/I yang ada di sekolah untuk peka terhadap keadaan lingkungan sekolah, sehingga seluruh kegiatan berjalan lancar serta mencapai tujuan awal yaitu menciptakan siswa/I yang terdukasi dan juga terhindar dari Tiga Resiko Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat peneliti berikan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam upaya mencegah Triad KRR (seks bebas, pernikahan dini, dan NAPZA) di Kota Medan dengan fokus pada kolaborasi antara Dinas P3APMP2KB Kota Medan dan Sekolah Harapan Mandiri. Berdasarkan model collaborative governance yang melibatkan empat indikator utama kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Awal (Sharing Condition)

- 1) Kesesuaian Tujuan : Terdapat kesamaan tujuan antara pemerintah dan sekolah yang mendukung kolaborasi. Namun, banyak sekolah yang belum sepenuhnya

berkomitmen pada pencegahan Triad KRR, fokus utama mereka adalah pada pendidikan.

- 2) Program Generasi Berencana : Program ini telah diperkenalkan melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), namun belum luas diterapkan.
- 3) Kesenjangan Sumber Daya : Keterbatasan pendanaan menjadi kendala dalam pelaksanaan program, meskipun dukungan fasilitas dari pemerintah telah memadai.

2. Desain Kelembagaan (Institutional Design)

- 1) Regulasi dan Prosedur : Regulasi pemerintah membentuk dasar kolaborasi. Desain kelembagaan yang baik penting untuk memastikan tanggung jawab yang jelas dari semua pihak. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas P3APMP2KB memperkuat desain kelembagaan.
- 2) Kolaborasi Berkala : Dinas dan sekolah melakukan komunikasi secara teratur, meskipun perlu adanya peningkatan dalam implementasi dan pemantauan.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)

- 1) Efektivitas Kepemimpinan : Kepemimpinan dari Kepala Bina Ketahanan Remaja di Dinas P3APMP2KB menunjukkan efektivitas dalam memfasilitasi dan memberikan dukungan pada pelaksanaan program.
- 2) Aktivitas Kepemimpinan : Perlu adanya pengawasan lebih lanjut dan keterlibatan langsung dari pemimpin untuk meningkatkan hasil program.

4. Proses Kolaboratif (Collaborative Process)

- 1) Dialog Tatap Muka : Komunikasi yang efektif ini mendukung komitmen bersama untuk menjalankan program secara berkelanjutan.
- 2) Kepercayaan dan Komitmen : Kepercayaan antara Dinas dan sekolah, yang diperkuat dengan SK pelaksanaan PIK-R, membantu meningkatkan efektivitas program. Komunikasi berkala memperkuat komitmen dan hasil kolaborasi.



Secara keseluruhan, kolaborasi antara Dinas P3APMP2KB Kota Medan dan Sekolah Harapan Mandiri dalam mencegah Triad KRR telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, terutama terkait dengan pendanaan dan perluasan pelatihan. Penerapan rekomendasi yang disarankan dapat membantu meningkatkan efektivitas program dan mendukung keberhasilan upaya pencegahan Triad KRR di Kota Medan.

Saran

1. Meskipun terdapat kesamaan tujuan antara pemerintah dan sekolah, masih ada beberapa sekolah yang belum sepenuhnya berkomitmen terhadap pencegahan Triad KRR. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat sosialisasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pihak sekolah mengenai pentingnya peran mereka dalam program ini. Selain itu, perlu adanya insentif atau penghargaan bagi sekolah yang berkomitmen penuh dalam implementasi program pencegahan KRR.
2. Program Generasi Berencana melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) perlu diperluas jangkauannya ke lebih banyak sekolah dan komunitas di Kota Medan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan penyuluhan dan pelatihan tentang pentingnya perencanaan kehidupan yang sehat dan terencana bagi generasi muda.
3. Mengingat adanya kesenjangan sumber daya, khususnya dalam hal pendanaan, sangat penting untuk mencari solusi alternatif, seperti kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga donor yang dapat mendukung pendanaan program. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi para remaja dapat menjadi langkah yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, Robert, and Michael McGuire. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press, 2003.
- Bryson, John M., and Barbara C. Crosby. *Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Recommended Research*. 2006.
- Dahlan, Ali. *Kolaborasi Publik dan Swasta dalam Pengembangan Wilayah*. Penerbit Pustaka Pelajar, 2016.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Kurniadi, Soleh Suryadi. (2021). *Collaborative Governance: Teori dan Implementasi*.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Muhammad Noor, S. M. (2022). *Vcollaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Surabaya: BILDUNG.
- Aldhira Gusmiara Danastry, T. K. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1-6.
- Arrozaq, D. L. (n.d.). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapoitan di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik*, 1-13.
- Aziz, A. R. (n.d.). Penerapan Program Generasi Berencana (GENRE) di Kota Palembang. *Jurusan Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)*, 1-18.
- Cahyono, A. S., Dewi, R. S., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto, S. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3), 340-357.



Dewi, N. L. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1-11.

Elok Prihatin, D. I. (n.d.). Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-17.

Fawwaz Aldi Tilano, S. S. (n.d.). Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-18.

Ikhwani Saufa, G. P. (2023). Pentingnya Edukasi TRIAD KRR Untuk Remaja pada Generasi Berencana. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 1-7.

Lestari, R. M., & Farahnisa, T. (2020). Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu. *ijd-demos*, 2(3).

Nasrulhaq. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publ. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-8.

Nurul Ufa Nainggolan, B. M. (2022). Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1-10.

Rika Kusdinar, F. F. (2022). Efektivitas Program Transmigrasi Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 99.

Romauli, S., & Warouw, N. H. (2024). Edukasi Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) di Pondok Pesantren Darul Ma'Arif Numbay Kota Jayapura. *Madaniya*, 5(1), 146-156.

Sholichah, N. (2022). Penyuluhan Triad Krr (Kesehatan Reproduksi Remaja). *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(6), 1113-1118.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidayaan Ikan